

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan laus laut yang lebih besar dari luas daratan, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan menjadikannya sebagai negara yang strategis dan bernilai penting bagi dunia. Namun dibalik semua itu, Indonesia masih terus menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim non tradisional. Indonesia sebagai negara maritim sangat rentan untuk menghadapi ancaman keamanan maritim yang berasal dari pencemaran sampah laut. Oleh karena itu Indonesia berkomitmen untuk menghapuskan isu keamanan maritim tersebut dengan upaya mewujudkan agenda global SDGs. Salah satu tujuan SDGs yang berkaitan dengan pencemaran laut adalah SDGs 14 khususnya 14.1 yang membahas mengenai pengurangan sampah plastik dan polusi nutrisi pada laut.

Bentuk nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam penanganan isu pencemaran laut ini dapat dilihat pada level nasional maupun internasional dengan mengeluarkan berbagai produk hukum seperti Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018, mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut serta membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut. Pada level internasional Indonesia bergabung menjadi negara anggota International Maritime Organizations sebagai upaya menangani isu keamanan maritim dan pelayaran.

Indonesia turut melakukan berbagai kerja sama bilateral maupun multilateral terkait penanganan pencemaran laut dengan sesama negara anggota IMO seperti diplomasi bersama Australia, Jepang, Filipina, Singapura dan Malaysia. Indonesia juga meratifikasi dan berperan aktif di dalam konvensi serta perjanjian internasional yang dikeluarkan oleh IMO seperti MEPC, MARPOL 73/78 Annex V, Konvensi Basel, dan Glo Litter Partnership. Meskipun begitu, data yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut Indonesia menyampaikan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 Indonesia masih belum optimal dalam mencapai target sesuai

dengan yang ditetapkan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Agend SDGs 14.1.

Tantangan yang dihadapi Indonesia pada level nasional adalah tingkat pengumpulan sampah yang belum maksimal, anggaran tata kelola sistem persampahan dan kapasitas SDM di daerah yang belum memadai, lembaga pengelola sampah di daerah yang belum efektif, konsumsi plastik yang semakin meningkat, sistem persampahan di pelabuhan dan objek wisata bahari belum optimal, kesadaran masyarakat dan partisipasi publik yang masih perlu ditingkatkan dalam mengelola sampah dari sumbernya serta sisten pengelolaan data persampahan darat dan laut yang belum terintegrasi. Sedangkan dalam level internasional beberapa perjanjian kerjasama belum dimanfaatkan secara maksimal, beberapa perjanjian belum sampai pada tahap realisasi yang dapat memberikan dampak besar pada pengurangan pencemaran laut di Indonesia.

6.2 Saran

6.2.1. Saran praktis

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara yang telah dilakukan peneliti dalam menyusun penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang diajukan. Indonesia masih memiliki kelemahan dalam upaya implementasi kebijakan dan keterbatasan biaya dalam mewujudkan agenda SDGs 14 maupun keikutsertaan Indonesia di forum global seperti IMO. Berdasarkan wawancara peneliti dengan TKN PSL dietmukan bahwa belum terwujudkan penanganan sampah di laut Indonesia disebabkan keterbatasan anggaran dan kurangnya teknologi yang dimiliki oleh Indonesia. Belum lagi implementasi penengakan hukum di Indonesia masih kurang tegas dan kurangnya pengawasan terhadap tindakan pencegahan dan penanganan sampah laut. Selain itu, Indonesia perlu mempertimbangkan sspek sumber daya manusia dan teknologi perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan riset serta *joint research* dengan negara lain dalam ikatan kerja sama pertahanan keamanan maupun sektor maritim secara berkelanjutan dengan sesama anggota IMO. Indonesia juga diharapkan untuk memiliki kerjasama bilatreal maupun multilateral dibawah naungan IMO yang lebih berfokus

pada isu pencemaran sampah mengingat kerugian yang dialami Indonesia saat ini sangat besar akibat dari pencemaran sampah.

Pada saat penelitian ini dilakukan, Indonesia telah melaksanakan Pemilu dengan presiden Prabowo menggantikan Joko Widodo sehingga berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan TKN PSL menyatakan bahwa RAN PSL ini akan dibahas kembali kepada presiden terpilih selanjutnya mengingat hingga penelitian ini ditulis Indonesia masih belum optimal untuk mencapai target yang ditetapkan. Indonesia akan terus berupaya dalam mewujudkan agenda SDGs 14 dari level nasional maupun internasional. Adapun upaya Indonesia pada panggung internasional dengan menggunakan visi Poros Maritim Dunia sebagaimana yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam menjadikan PMD sebagai visi diplomasi maritim Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Indonesia juga akan terus melanjutkan kerja sama bilateral maupun multilateral bersama anggota IMO lainnya dan akan terus berperan aktif di dalam forum diskusi, konvensi maupun perjanjian internasional yang dibawah oleh IMO.

6.2.2. Saran teoritis

Penelitian ini juga diharapkan dapat membawa manfaat sebagai sumber pengetahuan dan wawasan mengenai upaya Indonesia mewujudkan agenda SDGs 14.1 sebagai anggota IMO di tahun 2022-2023. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat membahas isu-isu pencemaran sampah serta upaya diplomasi Indonesia sebagai anggota IMO secara lebih mendalam, komprehensif dan analitis. Penelitian selanjutnya juga diharapkan bisa menggunakan teori-teori hubungan internasional lainnya untuk mengangkat sudut pandang yang berbeda dan analisa yang baru sehingga dapat memperkaya pengetahuan dalam ilmu hubungan internasional.